



**KEPERCAYAAN DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN BATANG**

**Haryani – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharmaputera
Muchamad Syafruddin – Universitas Diponegoro**

ABSTRACT

This study examines empirically the impact of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government. According to the work of motivational and expectations theory), theoretical framework is designed to enable an assessment of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance.

The study is based on data collected from managers and employees involved in establishing budget in each of subunit in local government, namely Batang. In apart of the results support the hypotheses and demonstrate the consequences of the antecedent factors power on use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government.

Key Words: Managerial Performance, Use of Regulation of the budget systems, Ease of Use, Usefulness, Anxieties, and Attitude

1. PENDAHULUAN

Isu sentral dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa dan bagaimana yang berpengaruh terhadap proses implementasi (kesuksesan) Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Argumentasi yang mendukung penetapan isu-isu sentral ini adalah bahwa proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia sangat bergantung pada perubahan perilaku orang yang terlibat dalam proses tersebut, khususnya yang mengimplementasikan perubahan paradigma Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan paradigma ini, mengharuskan adanya perubahan cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak menyangkut proses implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyangkut kegiatan pelayanan publik secara umum.

Subjek penelitian yang akan diinvestigasi adalah perilaku aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara khusus adalah menyangkut aspek hubungan sebab (kausalitas) perilaku aparat tersebut. Aspek hubungan sebab (kausalitas) perilaku meliputi (a) tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (b) sikap (attitude), (c) perilaku/ behavior (tingkat implementasi Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) aparat pemerintah. Lebih lanjut tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari aspek perilaku berikut, (1) tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan (4) tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedang tingkat implementasi (perilaku) aparat selama proses Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari aspek perilaku berikut, (1) tingkat kepuasan kerja aparat dengan adanya aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan (2) tingkat kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah dengan adanya aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian ini difokuskan pada aturan menyangkut Keuangan Daerah dan Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui ada dua aturan pokok menyangkut Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu tentang Pemerintah Daerah (UU No. 32 Th 2004) dan perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah (UU No.33 Th 2004).

Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori tersebut memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioural intentions*). Keinginan berperilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang perilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi kepercayaan (*beliefs*) dan evaluasi, dan bahwa norma-norma subjektif seseorang merupakan fungsi kepercayaan normatif dan motivasi untuk memenuhi norma-norma tersebut.

Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian ini. Argumentasi penggunaan model ini adalah bahwa model penelitian teoritis tersebut bisa menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan Otonomi Daerah yang demikian luas, kompleks dan membutuhkan kemampuan dan skills teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari mereka.

Atas dasar uraian di atas, masalah penelitian yang dijawab dalam penelitian ini adalah (1) adakah pengaruh peraturan perundangan tentang Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada cara kerja aparat pemerintah daerah, khususnya tingkat kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah di kabupaten Batang. Dengan kata lain, adakah perubahan perilaku sosial (kelompok) dengan adanya berbagai aturan tentang Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten

Batang. (2) Jika ada perubahan perilaku sosial, bagaimanakah pola perubahan sosial ini terjadi. Apakah faktor-faktor seperti (a) tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (b) tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (c) sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (d) hasil kerja aparat pemerintah daerah selama proses Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai pola perubahan tertentu yang dapat diprediksi. Lebih lanjut tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan dilihat lebih rinci lagi dari segi (1) tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (3) tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Gambar berikut adalah model konseptual atau model teoritis (merupakan model perubahan sosial) yang diidentifikasi, dikembangkan, dianalisis dan dirumuskan atas dasar berbagai penelitian dan teori-teori perubahan sosial yang telah terumuskan terdahulu. Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori tersebut memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioural intentions*). Keinginan berperilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang

perilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi kepercayaan (*beliefs*) dan evaluasi, dan bahwa norma-norma subjektif seseorang merupakan fungsi kepercayaan normatif dan motivasi untuk memenuhi norma-norma tersebut.

Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) di atas merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian bagi penelitian ini. Secara lebih rinci, model penelitian ini selanjutnya merupakan model penelitian teoritis yang menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan Otonomi Daerah yang demikian luas, kompleks dan membutuhkan kemampuan dan skills teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari mereka.

Gambar berikut merefleksikan model penelitian yang menunjukkan hubungan atau pengaruh sebab akibat antara berbagai variabel atau berbagai faktor yang diteliti. Dalam gambar tersebut dinyatakan dan disugestikan bahwa dalam konteks proses implementasi otonomi daerah, hasil kerja (kinerja pekerjaan) aparat pemerintah daerah dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kegunaan berbagai aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tingkat kemudahan penggunaan atau penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pola jalur (*path*) yang terdiri dari (a) tingkat kebingungan (*anxiety*) yang dialami oleh aparat pmda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (b) sikap umum aparat pmda terhadap penggunaan atau penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam praktik kerja mereka; dan (c) tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri dalam praktik kerja mereka. Diskusi berikut di bawah ini merupakan sub bab yang mendiskusikan tentang komponen dan berbagai hubungan yang ditunjukkan dan digambarkan dalam model penelitian. Atas dasar model penelitian sebagaimana di gambar, selanjutnya juga dikembangkan dan dirumuskan berbagai proposisi-proposisi yang akan diuji secara empiris dengan alat statistik yang sebagaimana mestinya (*proper*). Adapun diskusi menyangkut argumentasi yang mendasari proposisi-proposisi tampak pada uraian di bawah berikut ini.

Hubungan Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pekerjaan

Kepuasan kerja menyangkut dimensi yang demikian luas (multipel) dan termasuk di dalamnya adalah kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik (Herzberg, 1966 dan Trist, 1976). Kepuasan intrinsik berasal secara langsung dari kerja yang dilakukan seseorang, sedang kepuasan ekstrinsik berasal dari hasil yang diperoleh ketika seseorang telah melaksanakan kerja itu sendiri, contoh skema kompensasi. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah kepuasan instrinsik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan intrinsik adalah kepuasan yang berasal dari perasaan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan seseorang yang diperoleh dari penyelesaian kerja orang tersebut secara sukses yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian segala hal yang menambah perasaan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan seseorang ketika sedang bekerja akan semakin meningkatkan kepuasan orang tersebut. Tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan perasaan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan seseorang. Ini

terjadi, karena penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meningkatkan kemampuan dan skill teknis seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi aparat pemda dalam menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, semakin tinggi pula orang tersebut. Dalam hal ini tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sebagai jumlah waktu yang digunakan dalam proses penyusunan APBD model baru. Argumentasi seperti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh King (1978) Agho (1993), walaupun dalam konteks yang lain.

Kuantitas dan kualitas kerja yang diselesaikan seseorang secara umum merupakan komponen kunci dalam mengestimasi kinerja pekerjaan seseorang (Irving et al., 1986; Stumpf dan Dawley, 1981). Penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang relatif baru akan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja seseorang. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; Pentland, 1989; Williamson dan Pence, 1989; dan Eveland dan Bikson, 1987; maka dapat diprediksi bahwa semakin tinggi penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemda, maka semakin tinggi pula kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 1 adalah:

- Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Hubungan Sikap terhadap Aturan dan Kinerja Pekerjaan

Dalam penelitian ini, sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai perasaan umum aparat pemda untuk lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam penyusunan APBD. Definisi ini diturunkan dari definisi yang telah dirumuskan peneliti terdahulu seperti, Allport, 1967; Fishbein dan Ajzen, 1975; dan Triandis, 1980. Dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara positif akan meningkatkan aparat pemda tersebut.

Jika seseorang dalam hal ini aparat pemda menyimpulkan bahwa pada tingkat tertentu, manfaat potensial penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka (penyusunan APBD) melebihi *cost* yang mereka keluarkan, maka mereka akan secara positif bersikap terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Dampak atau konsekwensi lebih lanjut dari ini adalah meningkatnya kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut. Dengan sikap yang positif, maka kinerja pekerjaan aparat pemda juga menjadi semakin positif atau meningkat. Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; dan Bhagat, 1983.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 2 adalah:

- Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Hubungan Sikap Terhadap Aturan dan Penggunaan Aturan

Ternasuk dalam penelitian-penelitian awal yang menginvestigasi hubungan antara sikap dan perilaku pemakai atau pengguna sesuatu adalah Lucas, 1975; Schewe, 1976; Robey, 1979; Ginzberg, 1981; dan Ives et al., 1983. Penelitian mereka ini menunjukkan dan menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua faktor adalah kuat dan signifikan. Oleh karena inilah maka dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan dan optimisme aparat pemda dalam menggunakan dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 3 adalah:

- Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hubungan Kebingungan Terhadap Aturan dan Kinerja dan Penggunaan

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemda dalam mempersepsikan, memahami, dan menerapkan/menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan Otda yang adalah tidak proporsional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis kebingungan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam, ketidak proporsionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (Spielberg, 1966; Howard, 1986). Dari situasi seperti ini maka dapat diprediksi bahwa semakin menungkat kebingungan

aparatus pemerintah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemerintah terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistis dan keprihatinannya. Intensitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan mengingkat dalam rangka merespon rangsangan khusus (dalam penelitian ini adalah keberadaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membujuk atau mendorong bahwa orang tersebut akan tetap atau tidak menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar argumentasi atau definisi ini maka dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemerintah dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 4 dan 5 sebagai berikut.

- Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Aparat Daerah.
- Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap Penggunaan Aparat Daerah terhadap Aturan.

Hubungan Kemudahan Penggunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Erat hubungannya dengan uraian yang ada di atas, penelitian juga memprediksi bahwa tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga semakin tinggi. Argumentasi yang mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku adalah kemandirian atau kemujaraban diri sendiri (self-efficacy). Sesuai dengan penelitian Bandura (1982), kemandirian atau kemujaraban diri sendiri (self-efficacy) adalah judgment atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat dengan mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang dibutuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah perkiraan aparat pemda dalam mengeksekusi atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar uraian ini dapat dijelaskan dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 6 adalah:

- Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Kemudahan Penggunaan Aturan dan Kinerja

Konsisten dengan uraian yang ada pada hipotesis 6 di atas, maka dapat diprediksi bahwa kemudahan tentang penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah. Selain itu, juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD. Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 7 adalah:

- Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada sikap aparat pemerintah daerah terhadap Kinerja.

Hubungan Kegunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Sesuai dengan karya penelitian Davis (1989) dan Adams (1992), kemudahan penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut, maka orang ini merasa akan meningkatkan kebebasannya dalam berusaha atau bekerja. Sedang penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Mengikuti penelitian Hill et al., 1987; Robey, 1979; dan Vroom, 1964, maka dalam konteks aparat pemda dan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 8 adalah:

- Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Hubungan Kegunaan Aturan dan Kinerja

Untuk memperkirakan apakah aparat pemda akan menggunakan atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, juga tergantung pada apakah aparat pemda tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau tidak. Jika aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemda tersebut. Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 9 adalah:

- Tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada sikap aparat pemerintah daerah terhadap Kinerja..

3. METODE PENELITIAN

Ada berbagai variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini. Variabel atau faktor Kemudahan Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan 11 item pertanyaan dengan menggunakan 5 poin Skala Likert. Skala pengukuran ini diadopsi dari item-item yang dikembangkan, diuji, dan digunakan dalam penelitian oleh Davis, 1989. Variabel atau faktor lainnya, yaitu Kegunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur atas dasar 6 item pertanyaan dengan menggunakan 5 poin skala Likert yang juga dikembangkan oleh Davis, 1989. Variabel atau faktor Kebingungan Aparat Pemda dalam memahami dan mengaplikasikan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur atas dasar ukuran atau skala yang dikembangkan dan digunakan oleh penelitian Howard, 1986. Pengembangan dan penggunaan alat ukur penelitian terhadap variabel ini adalah 6 item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Variabel atau faktor berikutnya adalah Sikap Aparat Pemda terhadap penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasar metode dan instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Hatcher dan Diebert (1987), penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang berapa tahun atau berapa bulan aparat Pemda mengetahui dan mengaplikasikan kedua aturan dalam pekerjaan mereka. Variabel Kinerja Pekerjaan yang diukur atas dasar cara yang dikembangkan dan digunakan oleh Brownell dan Dunk, 1991. Atas dasar penelitian yang dilakukan Brownell dan Dunk ini, instrumen jumlah item pertanyaan ada 2 item pertanyaan yang juga dengan 5 poin skala Likert.

Teknik analisis data adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling* selanjutnya disingkat dengan SEM). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS versi 13.0) dan *Analysis of Moment Structure* (AMOS versi 6.0). Analisis data dengan SEM dipilih karena analisis statistik ini merupakan teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan saling ketergantungan secara simultan (Hair *et al.*, 1998). Selain itu, metode analisis data dengan SEM memberi keunggulan dalam menaksir kesalahan pengukuran dan estimasi parameter.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun data jumlah responden diambil sebagai subjek penelitian ini adalah tampak seperti berikut. Jumlah sampel penelitian sebanyak 348 responden. Profil atau karakteristik dari 348 responden penelitian yang meliputi gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan lama menduduki jabatan disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Berdasarkan gender, sebahagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 222 (63,80 persen) dan perempuan sebanyak 126 (36,20 persen). Tingkat pendidikan responden sebahagian besar adalah Diploma yaitu sebanyak 233 atau 67,00 persen, Strata Dua dan Strata satu sebanyak 85 (24,40 persen), dan sebanyak 30 atau 8,60 persen yang berpendidikan di bawah Diploma.

Deskripsi Variabel Penelitian

Tabulasi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian adalah sebagai berikut. Deskripsi jawaban responden tentang

variabel-variabel penelitian yang diukur yaitu (1) kinerja pekerjaan, (2) Penggunaan, (3) *sikap*, (4) kebingungan, (5) kem. pengg., dan (6) kegunaan disajikan pada tabel 2. berikut ini.

Hasil pengukuran variabel kinerja menunjukkan skor sesungguhnya terletak pada kisaran teoritis yaitu 11-48, dengan skor rata-rata 30,66 dan standar deviasi 8,06. Pengukuran variabel penggunaan menunjukkan skor sesungguhnya terletak pada kisaran skor teoritis yaitu berkisar antara 9-28 dengan skor rata-rata 18,08, dan standar deviasi 4,84. Selanjutnya skor rata-rata sebesar 18,08 yang hampir sama dengan skor rata-rata total teoritis sebesar 18 (yaitu 6 dikali 3) mengindikasikan secara rata-rata responden kadang-kadang menggunakan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Kisaran teoritis variabel *sikap* adalah 16-80, dimana skor yang lebih rendah mengindikasikan *sikap* negatif terhadap peraturan dan skor yang lebih tinggi mengindikasikan *sikap* positif. Hasil pengukuran yang menunjukkan kisaran sesungguhnya variabel *sikap* adalah 22-74 dengan skor rata-rata 49,09 dan standar deviasi 10,81. Skor rata-rata sebesar 49,09 yang sedikit lebih besar dari skor rata-rata total teoritis sebesar 48 (16 dikali 3) mengindikasikan secara rata-rata responden cenderung memiliki *sikap* positif. Hasil pengukuran untuk kebingungan menunjukkan kisaran sesungguhnya adalah 8-29 dengan rata-rata 18,08 dan standar deviasi 4,96; untuk kemudahan penggunaan kisaran sesungguhnya adalah 7-28 dengan rata-rata 17,85 dan standar deviasi 4,13, dan untuk kegunaan kisaran sesungguhnya adalah 8-29 dengan rata-rata 17,85 dan standar deviasi 4,61. Hasil pengukuran semua variabel mengindikasikan masing-masing dimensi adalah bervariasi.

Pengujian *Non-Response Bias*

Responden yang digolongkan sebagai kelompok yang memberi respon lebih awal adalah responden yang mengembalikan kuesioner sampai batas akhir Maret 2009, dan responden yang digolongkan sebagai kelompok paling akhir adalah responden yang mengembalikan kuesioner setelah akhir Maret sampai dengan akhir April 2009. Hasil pengujian *non-response* bias dengan uji-t disajikan pada tabel 3.

Tampak pada tabel 3 hasil pengujian dengan uji-t menunjukkan dan menyimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor kinerja. Penggunaan, kebingungan, kem. pengg., dan kegunaan antara kedua kelompok responden tersebut ($p > 0,05$). Berdasarkan uji-t, disimpulkan data yang digunakan pada penelitian ini bebas dari *non-response* bias.

Hasil pengamatan atas *assesment of normality* untuk model struktural kinerja menunjukkan tidak terdapat nilai C.R yang lebih besar dari $\pm 2,58$ untuk semua variabel tunggal (indikator penelitian). Selanjutnya, hasil uji normalitas *multivariate* untuk model struktural kinerja menunjukkan nilai C.R kurtosis masing-masing sebesar 2,354 dan 1,952. Nilai tersebut belum melampaui nilai kriteria yang digunakan yaitu $\pm 2,58$ (Ghozali, 2005; 2008). Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan data penelitian terdistribusi secara normal baik secara *univariate* maupun *multivariate*. Dengan demikian disimpulkan asumsi normalitas data secara *univariate* maupun *multivariate* dipenuhi. Evaluasi terhadap *multivariate outliers* dilakukan dengan memperhatikan nilai *mahalanobis distance*. Nilai χ^2 untuk model struktural kinerja adalah $(50, 0,001) = 86,66$. Hal ini berarti semua kasus yang mempunyai nilai *Mahalanobis distance* yang lebih besar dari 88,66 untuk model struktural kinerja. Hasil pengamatan untuk model struktural kinerja menunjukkan nilai *Mahalanobis distance* teratas untuk masing-masing

model struktural adalah 67,888. Nilai *Mahalanobis distance* ini berada dibawah nilai χ^2 untuk masing masing model yaitu model struktural kinerja ($67,888 < 88,66$). Berdasarkan nilai *Mahalanobis distance* disimpulkan tidak terdapat *multivariate outliers* pada data penelitian ini.

Asumsi multikolineritas mengharuskan tidak adanya korelasi tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen. Nilai korelasi antara konstruk yang tidak diperbolehkan adalah sebesar 0,90 atau lebih (Ghozali dan Fuad, 2005, p. 38). Hasil pengamatan terhadap korelasi antara konstruk menunjukkan tidak terdapat korelasi yang mendekati nilai 0,90. Sebagai rangkuman hasil pengujian atas normalitas data, data *outlier*, dan multikolinearitas menunjukkan data penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan dengan analisis data menggunakan model persamaan struktural.

Hasil analisis faktor konfirmatori terhadap konstruk penelitian menunjukkan model pengukuran penelitian ini memiliki indeks-indeks fit yang baik. Hasil analisis faktor konfirmatori juga menunjukkan indikator-indikator yang mengukur konstruk memiliki validitas konvergen (*convergent validity*) yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui nilai loading faktor indikator masing-masing konstruk di atas 0,50 (Ghozali 2005; 2008).

Menurut Ghozali (2008), selain nilai loading faktor ukuran validitas konstruk lainnya adalah reliabilitas konstuk (*construct reliability*), *variance extracted* dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan

yang umum. Untuk menguji reliabilitas konstruk dilakukan dengan mengukur reliabilitas komposit (*composite reliability*) atau *Construct Reliability*. Tingkat reliabilitas suatu konstruk yang dapat diterima secara umum adalah nilai *Construct Reliability* lebih besar dari 0,7 [Ghozali, 2005; 2008].

Validitas konvergen suatu konstruk dapat juga dinilai dengan menghitung rata-rata varians yang diekstraksi (*avarage varianced extracted* atau AVE). *Variance extracted* memperlihatkan jumlah varians dari indikator yang diekstraksi oleh variabel bentukan yang dikembangkan. Nilai AVE yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator itu telah mewakili secara baik variabel bentukan yang dikembangkan. Angka yang direkomendasikan untuk AVE adalah lebih besar dari 0,5 ($AVE > 0,50$) [Ghozali, 2005; 2008].

Hasil perhitungan *construct reliability* dan AVE masing-masing konstruk disajikan pada tabel 4. Tampak pada tabel 4 semua konstruk penelitian memiliki nilai *consrtuct reliability* dan AVE yang sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan yaitu di atas 0,70 dan 0,50 (Ghozali, 2005; 2008). Hal ini menunjukkan semua konstruk memiliki validitas konvergen yang baik.

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur di konstruk-konstruk berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan dievaluasi lewat perbandingan akar kuadrat AVE dengan korelasi antara konstruk-konstruk berpasangan. Kriteria yang digunakan adalah nilai akar kuadrat dari AVE seharusnya melebihi korelasi antar pasangan konstruk (Ghozali 2008).

Model Persamaan Struktural Kinerja

Evaluasi terhadap kesesuaian yang baik model persamaan struktural kinerjadilakukan dengan memperbandingkan nilai indeks-indeks fit yang dihasilkan dari model dengan indeks-indeks fit yang direkomendasikan seperti yang disajikan pada tabel 6. Tampak pada tabel 6, hasil pengujian Chi-square sebesar 810,247 dengan probabilitas 0,432 menunjukkan model sangat fit. Kecuali indeks fit untuk AGFI yang berada sedikit di bawah kriteria yang direkomendasikan, nilai kriteria fit lainnya juga sesuai dengan yang direkomendasikan. Berdasarkan evaluasi terhadap indeks-indeks fit disimpulkan bahwa model persamaan struktural kinerjafit dengan data empiris.

Selanjutnya pada tabel 7. disajikan nilai-nilai koefisien regresi (*standardized estimated*), *standar error* (S.E), *critical ratio* (C.R), dan taraf signifikansi (probabilitas) yang menunjukkan hubungan kausalitas variabel yang dihipotesakan yang diestimasi dari model persamaan structural. Tampak pada tabel 8 terdapat enam jalur yang signifikan pada taraf nyata sebesar 0,05 atau di bawah 0,05 ($\leq 0,05$). Jalur-jalur yang signifikan adalah jalur dari *sikap* ke Penggunaan, jalur dari kegunaan ke Penggunaan, jalur dari *sikap* ke kinerja pekerjaan, jalur dari kebingungan ke kinerja pekerjaan, jalur dari kegunaan ke kinerja pekerjaan dan jalur dari Penggunaan ke kinerja pekerjaan. Tiga jalur lainnya ditemukan tidak signifikan yaitu jalur dari kebingungan ke Penggunaan, jalur dari kem. pengg. ke Penggunaan, dan jalur dari kem. pengg. ke kinerja pekerjaan. Selanjutnya model memberikan 23,2% varian di konstruk Penggunaan dan 26,3% varian di konstruk kinerja pekerjaan

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN RISET ANJURAN

Dari semua uraian dapat disimpulkan bahwa 9 hipotesis telah dikembangkan atas dasar teori tertentu. Namun berdasarkan pada tabel 8 dapat didimpulkan bahwa ada 5 hipotesis yang signifikan dengan nilai probabilitas kesalahan dibawah atau sama dengan 0,05. Dengan demikian 3 hipotesis tidak signifikan. Makna dari uji hipotesis-hipotesis ini adalah bahwa secara umum berbagai faktor harus dipertimbangkan ketika, baik regulator maupun operator (pengimplementasi) peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan akuntansi keuangan daerah akan menerapkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dari berbagai faktor yang tidak signifikan berperan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja adalah faktor kebingungan dan faktor kemudahan, para aparat pemerintah. Makna dari temuan ini adalah bahwa memang ada beberapa kesulitan pemahaman dan pengimplemntasian oleh aparat pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai peraturan dalam menjalankan tugasnya. dalam hal-hal tertentu kemungkinan besar, aparat ini kemudian ‘menggampangkan’ peraruran tersebut, hingga faktor atau variabel kemudahan ini menjadi tidak signifikan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja aparat pemerintah daerah.

Riset ini terbatas hanya pada aparat di sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Pemerintah Daerah Batang. Untuk itu perluasan di berbagai kabupaten, kota kemungkinan besar akan membawa manfaat [penelitian yang lebih besar. Selain itu beerbagai faktor atau variabel bisa jadi merupakan variabel yang lebih kuat berpengaruh terhadap penggunaan dan kinerja aparat pemerintah daerah, misal faktor kultur organisasional di masing-masing daerah, atau bahkan di masing-masing unit kerja dalam sebuah kabupaten

SNA XIII

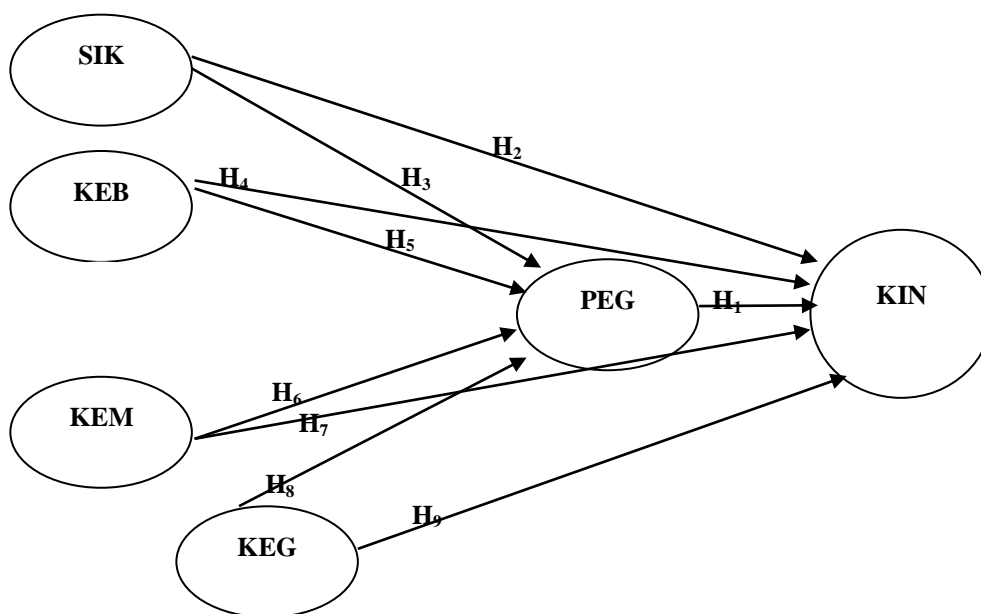
Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Model Empiris Perilaku Penggunaan Aturan



Sumber: Dikembangkan atas dasar Teori Tindakan Rasional (Fishbein dan Ajzen, 1975)

Keterangan :

SIK = Sikap terhadap Aturan;

KEM = Kemudahan Penggunaan Aturan

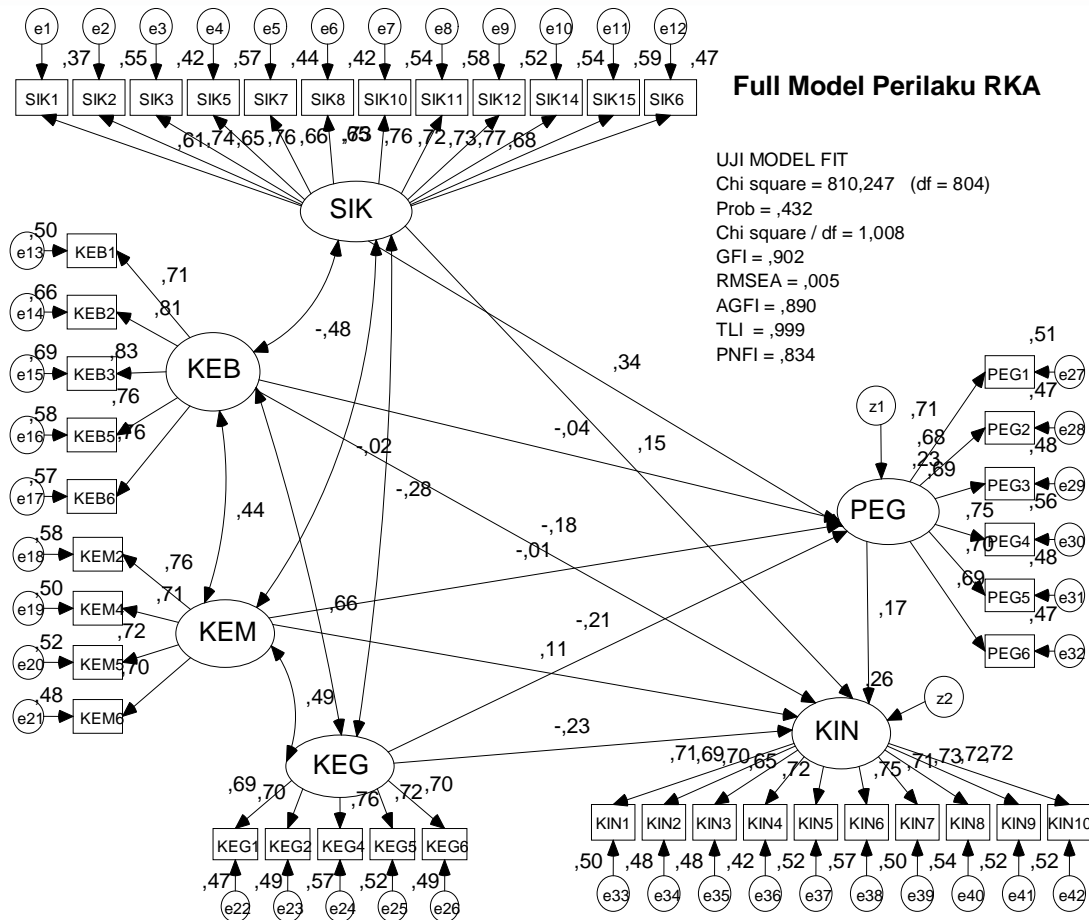
KEB = Kebingungan terhadap Aturan;

KEG = Kegunaan Aturan

PEG = Penggunaan Aturan ;

KIN = Kinerja Pekerja

GAMBAR 4.1 Hasil Pengujian Full Model Persamaan Struktural Perilaku RKA



Sumber: Hasil Output AMOS

DAFTAR TABEL

Tabel 1
Profil Responden (N= 348)

Keterangan		Jumlah	Persentase
Gender:	Laki-Laki	222	63,80
	Perempuan	<u>126</u>	<u>36,20</u>
	Jumlah	348	100,00
Pendidikan Terakhir:	Strata-Dua	9	2,60
	Strata-Satu	76	21,80
	Diploma	233	67,00
	Lainnya	<u>30</u>	<u>8,60</u>
	Jumlah	348	100,00
Lama Bekerja (Tahun)		Rata-Rata	Standar Deviasi
		7,37	4,64
Lama Menduduki jabatan (Tahun)		4,88	3,82

Sumber: Data Diolah, Hasil Output SPSS

Tabel 2.
Deskripsi Variabel Penelitian (N=348)

No	Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-Rata	Standar Deviasi
1	Kinerja	10-50	11-48	30,66	8,06
2	Penggunaan	6-30	9-28	18,08	4,84
3	Sikap	16-80	22-74	49,09	10,81
4	Kebingungan	6-30	8-29	18,08	4,96
5	Kem. Pengg.	6-30	7-28	17,85	4,13
6	Kegunaan	6-30	8-29	17,85	4,61

Sumber: Data Diolah, Hasil Output SPSS

Tabel 3.
Hasil Pengujian *Non-Responses Bias* (Uji-t)

Variabel	Kel Awal (N= 140)		Kel Akhir (N= 208)		Probabilitas
	Rata ²	S. D.	Rata ²	S. D.	
Kinerja	30,94	7,79	30,47	8,26	0,599
Penggunaan	9,05	2,59	9,51	2,91	0,128
Sikap	18,49	4,40	17,81	5,09	0,195
Kebingungan	48,91	10,73	49,21	10,88	0,805
Kem. Pengg.	17,73	4,56	18,32	5,21	0,274
Kegunaan	17,41	3,30	18,14	4,63	0,111

Sumber: Data Diolah, Hasil Output SPSS

Tabel 4.

Reliabilitas dan AVE Kontruk Penelitian

Konstruk	Construct Reliability	AVE
Kinerja	0,911	0,505
Penggunaan	0,843	0,557
Sikap	0,863	0,512
Kebingungan	0,923	0,501
Kem. Pegg.	0,883	0,602
Kegunaan	0,838	0,509

Sumber: Diolah dari Output AMOS

Tabel 5.

Statistik Deskriptif, Faktor Loading, Reliabilitas dan Validitas Kontruk

Konstruk*	Rata ² (S. D.)	Fak. Loading	Const.Reliability	AVE
Kinerja	30,66 (8,06)	0,651-0,753	0,911	0,505
Penggunaan	9,33 (2,79)	0,737-0,748	0,843	0,557
Sikap	18,08 (4,84)	0,680-0,743	0,863	0,512
Kebingungan	37,05 (9,94)	0,609-0,770	0,923	0,501
Kem. Pegg.	14,96 (4,56)	0,710-0,833	0,883	0,602
Kegunaan	11,66 (3,41)	0,692-0,752	0,814	0,523

Sumber: Data Diolah, Hasil Output SPSS dan AMOS (Lampiran C dan D)

*Nilai dalam kurung di konstruk adalah jumlah item indikator setelah analisis faktor konfirmatori.

Tabel 6.

Evaluasi Terhadap Indeks-Indeks Fit

Indeks Fit	Hasil Model	Nilai Yang Direkomendasikan	Evaluasi Model
Chi-square	810,247	Lebih kecil dari 871,07 (χ^2 dengan df = 804 adalah 871,07)	Baik
Probabilitas	0,432	$\geq 0,05$	Baik
Chi-square/df	1,008	$\leq 2,00$	Baik
GFI	0,902	$\geq 0,90$	Baik
RMSEA	0,005	$\leq 0,08$	Baik
AGFI	0,890	$\geq 0,90$	Marginal
TLI	0,999	$\geq 0,90$	Baik
PNFI	0,834	0,60-0,90	Baik

Sumber: Hasil Output AMOS

Tabel 7.
Hasil Model Persamaan Struktural Perilaku Kinerja

Hubungan Variabel	Hipotesis	Koefisien	S.E.	C.R	P
KIN ← PEG	H1	0,166	0,068	2,567	0,010
KIN ← SIK	H2	0,146	0,082	2,132	0,033
PEG ← SIK	H3	0,342	0,084	4,663	0,001
KIN ← KEB	H4	-0,178	0,082	-1,964	0,050
PEG ← KEB	H5	-0,039	0,082	-0,410	0,682
PEG ← KEM	H6	-0,011	0,077	-0,155	0,877
KIN ← KEM	H7	0,111	0,077	1,578	0,115
PEG ← KEG	H8	-0,214	0,090	-2,357	0,018
KIN ← KEG	H9	-0,232	0,092	-2,635	0,008
Koefisien Determinasi: PEG = 0,232 KIN = 0,263					

Sumber: Diolah dari Hasil Output AMOS

PUSTAKA ACUAN

- Adams, D.A., R.R. Nelson, and P.A. Todd, 1992, Perceived usefulness, ease of use, and information technology: A replication, *MIS Quarterly* 16, 227-247.
- Agho, A.O., C.W. Mueller, and J.L. Price, 1993, Determinants of employee, job satisfaction: An empirical test of a causal model, *Human Relations*, 46, 1007-1027.
- Allport, G.W., 1967, The historical background of modern social psychology, in: C. Murchison, ed., *Handbook of sociology* (Clak University Press, Wocester) 798-844.
- Alwin, D.F. and R.M. Hauser, 1975, The decomposition of effects in path analysis, *American Sociological Review* 40, 37-47
- Bandura, A., 1982, Self-efficacy mechanism in human agency, *American Psychologist* 37, 122-147.
- Bhagat, R.S, 1983, Effects of stressful life events on individual performance effectiveness and work adjustment processes within organizational settings: A research model, *Academy of Management Review* 8, 660-671.
- Brownell, P. and A.S. Dunk, 1991. Task uncertainty and its interaction with budgetary participation and budget emphasis; Some methodological issues and empirical investigation. *Accounting Organization and Society* 16. 693-703.
- Chenhall, R.H. and P. Brownell, 1988. The effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: Ambiguity as an intervening variable, *Accounting Organization and Society* 13, 225-233.
- Chin, J.P., V.A. Diehl, and K.L. Norman, 1988, Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface, in: E. Soloway, D. Frye, and S. Sheppard. eds., *CHI'88 human factors in computing system conference proceedings* (Association of Computer Machinery, Washington D.C.) 213-218.
- Collison Black, R.D., 1990, Utility, in: J. Eatwell, M. Milligate, and P. Newman, eds., *The New Pelgrave: Utility and probability* (Macmillan, London) 259-302.
- Compeau, D.R. and C.A. Higgins, 1995, Computer self-efficacy; Development of a measure and initial test, *MIS Quaterly* 19, 18-211.
- Computer Week, 1995, PCs get grunt for big business, *Computer Week*, Aug, 18, 25.
- Cooper, R., 1976. Hoe jobs motivate, in: M. Weir,ed., *Job satisfaction: Challenges and responses in modern Britain* (Fontana/Collins, London) 138-146.

- Davis, F.D., 1989. Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance information technology, *MIS Quartely* 13, 319-340.
- Davis, F.D., R.P. Bagozzi, and P.R. Warshaw, 1989, User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models, *Management Science* 35, 982-1003.
- Eveland, J.D. and T.K. Bikson, 1987. Evolving electronic communication networks: An empirical asessment, *Office: Technology ang People* 3, 103-128.
- Ferguson, C. and P. Nevell, 1994, Cross-sectional proxies of changes over time: An analysis of accountants attitudes toward using computers, Paper presented at the Accounting Association of Australia and New Zealand Coference, Wollongong.
- Fishbein, M. and I. Ajzen, 1975, *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and reserch* (Addison-Wesley, Reading, MA).
- Ginzberg, E., 1982. The mechanization of work: Review of the macro impact of technology, *Scientific American* 247, 39-47.
- Ginzberg, M.J., 1981, Early diagnosis og MIS implementation failure: Promising result and unanswered questions, *Management Science* 27, 459-478.
- Giuliano, V.E., 1982, The mechanization if office work in the service industry, *Scientific American* 247, 125-134.
- Hackman, J.R. and G.R. Oldham, 1975 and 1980, *Work redesign* (Sddison-Wesley, Reading, M.A).
- Hatcher, M.E. and C. Coats, 1984, A scale for measuring the acceptance of micro computers in the office at Sheller Globe Corporation. In: *Proceedings of American Institute of Decision Sciences (Western Region) Conference* (Kahuka Oahu, Hawaii).
- Hatcher, M.E. and T.R. Diebert, 1987, Predicting end-user acceptance of microcomputer in the workplace, *International Journal of Man-Machine Studies* 26, 695-705.
- Herzberg, F., 1966, *Work and the nature of man* (World Publishing Company, New York).
- Hill, T., N.D. Smith, and M.F. Mann, 1987. Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technolgies: The case of computers, *Journal of Applied Psychology* 72. 307-313.



- Howard, G.S., 1986, Computer anxiety and the use of microcomputers in management (UMI Research Press, Ann Arbor, MI).
- Igbaria, M., 1994, an examination of the factors contributing to micocomputer technology acceptance, *Accounting, Management and Information Technology* 4, 205-224.
- Irving, R.H., C.A. Higgins, and F.R. Safayeni, 1986. Computerize performance monitoring systems: Use and abuse, *Communications of the ACM* 29, 794-800.
- Ives, B.I., M.H. Olson, and J.J. Baroudi, 1983, The measurement of user satisfaction, *Commucations of the ACM* 26, 785-793.
- King, W.R. and J.I. Rodriguez, 1978, Evaluating management information system, *MIS Quartely* 2, 43-51.
- Kling, R., 1978, The impact of computing upon the work of managers, data analysts and clerks (University of California Irvine, Irvine).
- Kraut, R., S. Dumais, and S. Koch, 1989, Computerization, productivity, and quality of worklife, *Communications of the ACM* 32, 220-238..
- Lepore, S.J., R. Kling, S. Iacono, and J. George, 1989, Implementing dekstop computing, infrastructure, and quality of worklife, in: *SIM annual conference proceedings*, 223-235.
- Long, R.J., 1993, The impact of new office information technology on job quality of female and male employees, *Human Relations* 46, 939-961.
- Lucas, H.C., 1975, Performance and the use of an information system. *Management Science* 21, 908-919.
- McCroskey, J.C. and T.J. Young, 1979, The use and abuse of factor analysis in communication research, *Human Communication Research* 5, 375-382.
- Medcof, J.W., 1989, The effect of extent of use of information technology and job of the user upon task characteristic, *Human Relation* 42, 23-41.
- Miller, J., 1989, Information systems effectiveness: The fit between business needs and system capabilities, in: *SIM annual conference proceedings*, 273-287.
- Mumford, E., 1972, *Job satisfaction* (Longman, London).
- Nevell, P., 1991, an investigation of the effects of computer spreadsheets on cognitive decision behavior, PhD thesis (The University of Queensland).

- O'Brien, G.E. and P. Humphrys, 1982, The effects of congruency between work values and perceived job attributes upon the job satisfaction of pharmacists, *Australian Journal of Psychologists* 34, 91-101.
- Parasuraman, S., and M. Igarria, 1990, An examination of gender differences in the determinants of computer anxiety and attitudes toward microcomputers among managers, *International Journal of Man-Machine Studies* 32, 327-340.
- Pentland, B.T., 1989, Use and productivity in personal computing: An empirical test, in: *SIM annual conference proceedings*, 211-222.
- Quinn, J.B., J.J. Baruch, and P.C. Paquette, 1987, Technology in services, *Scientific American* 257, 24-32.
- Rafaeli, A., 1986, Employee attitudes toward working with computers, *Journal of Occupational Behavior* 7, 89-106.
- Reed, S.R., 1989, The top 100 companies with PCs, *Personal Computing*, Sept 70-90.
- Robey, D., 1979, User Attitudes and management information system use. *Academy of Management Journal* 22, 527-538.
- Robey, D., and R.F. Zeller, 1978, Factors affecting the success and failure of an information system for product quality, *Interfaces* 8, 70-75.
- Schewe, C.D., 1976, The management of the information system user. An exploratory analysis, *Academy of Management Journal* 19, 577-590.
- Specht, D., 1975, On the evaluation of causal models, *Social Science Research* 4, 113-133.
- Speilberger, C.D., 1966, *Anxiety and behavior* (Academic Press, New York).
- Stumphf, S.A. and P.K. Dawley, 1981, Predicting voluntary and involuntary turnover using absenteeism and performance indices, *Academy of Management Journal* 24, 148-163.
- Swanson, E.B., 1982, Measuring user attitudes in MIS research: A review, *Omega* 10, 157-165.
- Szajna, B., 1996, Empirical evaluation of the revised technology acceptance model, *Management Science* 42, 85-92.
- Taber, T.D. and E. Taylor, 1990, A review and evaluation of the psychometric properties of the job diagnostic survey, *Personnel Psychology* 43, 465-500.

SNA XIII

Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- Thompson, R.L., C.A. Higgins, and J.M. Howell, 1991, Personal computing: Toward a conceptual model of utilization, *MIS Quarterly* 15, 125-143.
- Triandis, H.C., 1980 Values, attitudes, and interpersonal behavior, in: Nebraska symposium on motivation, 1979: Beliefs, attitudes, and values (University of Nebraska, Lincoln, NE) 195-259.
- Trist, E., 1976, Critique of scientific management in terms of socio-technical theory, in: M. Weir, ed., *Job satisfaction: Challenges and responses in modern Britain* (Fontana/Collins, London) 81-90.
- Turner, J.A., 1984, Computer mediated work: The interplay between technology and structured jobs, *Communications of the ACM* 27, 1210-1217.
- Vroom, V.H., 1964, *Work and motivation* (John Wiley and Sons, New York).
- Williamson, M.M. and P. Pence, 1989, Wordprocessing and students writers, in: B.K. Britton and S.M. Glynn, eds., *Computer writing environments: Theory, research, and design* (Lawrence Erlbaum Associates, NJ) 93-127.



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

Semarang, April 2009

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Lampiran : Satu set kuesioner

Kepada Yth:
Bapak/Ibu

.....
Pemerintah Kabupaten
di
Tempat

Dengan hormat,

Kami sedang melakukan penelitian penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 dan No. 26 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia. Penelitian ini bermaksud menginvestigasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kesuksesan penerapan kedua aturan tersebut, yang hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.

Untuk maksud tersebut di atas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu pimpinan unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD berpartisipasi dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner yang kami ajukan. Perlu kami sampaikan, Bapak/Ibu tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner karena data akan kami sajikan secara agregat, dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu berikan akan kami jaga.

Demikianlah permohonan kami ini, atas terkabulnya permohonan ini sebelumnya kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami,
Ketua Team Peneliti

Dra. Haryani, MM.

KUESIONER

Petunjuk

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Pada tiap bagian berisi beberapa butir pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak/Ibu diminta untuk memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak yang tersedia. Sedangkan untuk pertanyaan yang memiliki jawaban isian, Bapak/Ibu diharapkan menjawab pada tempat yang telah disediakan. Yakinkanlah bahwa Bapak/Ibu tidak menyilangkan lebih dari satu kotak, dan tidak terdapat pertanyaan yang belum dijawab/terlewatkan.

I. Pertanyaan Identitas

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jabatan :
3. Lama Menduduki Jabatan : tahun (Bulatkan dalam tahun)
4. Jenis Kelamin:
 Laki-Laki : Peruan
5. Pendidikan Terakhir
 Strata Tiga : Strua
 Strata Satu : Lai

II. Daftar Pertanyaan Penelitian

**(i) A. Persepsi tentang Kegunaan
 Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006**

Bagian ini mengukur persepsi Bapak/Ibu tentang kegunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Menggunakan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Mempermudah penyusunan anggaran yang beorientasi pada kepentingan publik dan kinerja

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Memungkinkan penyusunan dan penetapan anggaran yang lebih tepat waktu

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Mempermudah koordinasi dalam penyusunan anggaran.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

5. Memungkinkan terdapatnya keselaran antara anggaran dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

6. Memungkinkan penggunaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

(ii) **B. Persepsi Tentang Kemudahan Penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006**

Bagian ini mengukur persepsi Bapak/Ibu tentang kesulitan atau kemudahan dalam penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju		

1. Belajar memahami penerapan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran merupakan hal yang mudah bagi saya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju		

2. Saya tidak mendapat kesulitan memahami penggunaan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju		

3. Saya dapat dengan mudah menerapkan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju		

4. Saya merasa penerapan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sulit saya lakukan dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju		

(iii) **C. Kebingungan Penggunaan**

Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006

Bagian ini mengukur persepsi Bapak/Ibu tentang kebingungan atau kecemasan dalam penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

1. Saya merasa bingung menerapkan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Saya merasa cemas dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin, karena saya takut melakukan kesalahan dalam menerapkan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Penerapan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 membuat saya merasa tertekan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Saya ragu penggunaan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam kedua aturan tersebut.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

(iv)

D. Penggunaan Permendagri No. 13

dan 26 Tahun 2006

Bagian ini mengukur sejauh mana penerapan Permendagri No. 13 dan 26 yang Bapak/Ibu lakukan dalam tugas pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

1. Pengelolaan keuangan daerah pada unit yang saya pimpin sepenuhnya telah mempedomani Permendagri no 13 Tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin sepenuhnya telah mempedomani Permendagri no 26 Tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin sepenuhnya telah mempedomani Permendagri no 13 dan no 26 Tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

(v)

(vi)

(vii)

D. Penggunaan Permendagri No. 13

dan 26 Tahun 2006 (Alt.2)

Bagian ini mengukur sejauh mana penerapan Permendagri No. 13 dan 26 yang Bapak/Ibu lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sama Sekali				Berpedoman
Tidak Mengacu				Sepenuhnya

1. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah pada unit yang Bapak/Ibu pimpin, kira-kira sejauh mana Bapak/Ibu telah mempedomani Permendagri no 13 tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sama Sekali				Berpedoman
Tidak Mengacu				Sepenuhnya

2. Dalam melaksanakan tugas penyusunan anggaran pada unit yang bapak/ibu pimpin, kira-kira sejauh mana Bapak/Ibu telah mempedomani Permendagri no 13 tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sama Sekali				Berpedoman
Tidak Mengacu				Sepenuhnya

3. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang bapak/ibu pimpin, kira-kira sejauh mana Bapak/Ibu telah mempedomani Permendagri no 13 dan no 26 tahun 2006.

1	2	3	4	5
Sama Sekali				Berpedoman
Tidak Mengacu				Sepenuhnya

(viii)

D. Penggunaan Permendagri No. 13

dan 26 Tahun 2006 (Alt.3)

Bagian ini mengukur sejauh mana penerapan Permendagri No. 13 dan 26 yang Bapak/Ibu lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan.

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran.
 a. Belum Pernah b. 1 tahun c. Lebih dari satu tahun
2. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada unit yang Bapak/Ibu pimpin, kira-kira berapa persen dari tugas yang Bapak/Ibu lakukan telah mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006.
 a. 0-20%
 b. 21-40%
 c. 41-60%
 d. 61-80%
 e. 81-100%
3. Dalam penyusunan anggaran pada unit yang Bapak/Ibu pimpin, kira-kira berapa persen dari tugas yang Bapak/Ibu lakukan telah mempedomani Permendagri No 26 Tahun 2006.
 a. 0-20%
 b. 21-40%
 c. 41-60%
 d. 61-80%
 e. 81-100%
4. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang Bapak/Ibu pimpin, kira-kira berapa persen dari tugas yang Bapak/Ibu lakukan telah mempedomani Permendagri No. 13 dan No 26 Tahun 2006.
 a. 0-20%
 b. 21-40%
 c. 41-60%
 d. 61-80%
 e. 81-100%

(ix) **E. Sikap Terhadap Permendagri No.**

13 dan 26 Tahun 2006

Bagian ini mengukur sikap Bapak/Ibu tentang Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan sikap Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

1. Permendagri No.13 dan No. 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi saya dalam pelaksanaan tugas.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Saya menyambut dengan baik terbitnya Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006, karena kedua aturan tersebut memuat secara jelas dan lengkap tata cara dan proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran menyediakan kesempatan bagi saya untuk dapat mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 menimbulkan keletihan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

(x)

(xi) **F. Kepuasan Kerja atas Penggunaan**

Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006

Bagian ini mengukur kepuasan kerja yang Bapak/Ibu rasakan sebagai akibat penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman atau perasaan Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

1. Penerapan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran memberikan kebahagiaan bagi saya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Penggunaan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran memberikan kesempatan pada saya untuk mengalokasikan keuangan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Penggunaan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran memberi kesempatan pada saya untuk menyusun anggaran yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Saya merasa bahagia dengan terbitnya Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 karena saya memiliki kesempatan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada unit yang saya pimpin.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

(xii) **F. Kepuasan Kerja atas Penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006 (AL)**

Bagian ini mengukur kepuasan kerja yang Bapak/Ibu rasakan sebagai akibat penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman atau perasaan Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

Penggunaan Permendagri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin memberi kepuasan pada saya karena:

1. Memberi kesempatan bagi saya untuk melakukan koordinasi yang lebih baik dan mudah dengan pihak lain.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Memberi kesempatan bagi saya mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Memberi kesempatan bagi saya untuk dapat menyusun anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Memberi kesempatan bagi saya untuk menyusun anggaran dengan tepat waktu.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

5. Memberi kesempatan bagi saya untuk menyusun anggaran yang selaras dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

G. Kinerja Pekerjaan atas Penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006

Bagian ini mengukur kepuasan kerja yang Bapak/Ibu rasakan sebagai akibat penggunaan Permendagri No. 13 dan 26 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

Penggunaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran APBD akan:

1. Meningkatkan kinerja saya dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

2. Tugas penyusunan anggaran dapat saya lakukan dengan tepat waktu.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

3. Pengalokasian dan penggunaan anggaran yang saya lakukan menjadi lebih efektif dan efisien.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

4. Kinerja saya dalam koordinasi dengan aparatur yang lain menjadi lebih baik.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

5. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah menjadi lebih efektif.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

6. Secara keseluruhan meningkatkan kinerja saya dalam bidang perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju	

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com
